



Manajemen Evaluasi Pendidikan terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa di Lembaga Pendidikan Kepolisian di SPN Polda Maluku

Educational Evaluation Management on Improving the Quality of Student Learning at the Police Education Institution in SPN Polda Maluku

Calvrin Saukoly¹, Tanwey Gerson Ratumanan¹, Paul Arjanto¹

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura

*Correspondence: soukoly@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 04-05-2025

Revised: 11-06-2025

Accepted: 03-07-2025

Published: 30-08-2025

ABSTRAK

Evaluasi pendidikan merupakan elemen strategis dalam menjamin kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi manajemen evaluasi pendidikan di SPN Polda Maluku secara komprehensif. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dari tiga kelompok informan utama, yaitu manajerial, instruktur, dan peserta didik. Temuan menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan secara sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut yang melibatkan berbagai aktor, serta didukung oleh digitalisasi instrumen dan pelaporan. Evaluasi tidak hanya menilai aspek akademik, tetapi juga integritas dan kesiapan operasional siswa. Proses ini menunjukkan keterpaduan antara kebutuhan institusi dan pengembangan karakter peserta didik. Studi ini memperlihatkan suatu pendekatan evaluatif yang kontekstual dan berkelanjutan dalam pendidikan kepolisian. Implikasi dari hasil ini menekankan pentingnya pembentukan unit evaluasi mandiri, penguatan pelatihan evaluatif bagi instruktur, serta pemutakhiran sistem berbasis teknologi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan kelembagaan.

Kata kunci: evaluasi, pendidikan, pendidikan kepolisian

ABSTRACT

Educational evaluation is a strategic element in ensuring the quality of learning in police education institutions. This study aims to comprehensively describe the implementation of educational evaluation management at SPN Polda Maluku. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis involving three key informant groups: managerial staff, instructors, and cadets. Findings reveal that evaluation is carried out systematically through planning, execution, and follow-up, engaging multiple actors and supported by digitalized tools and reporting systems. Evaluation encompasses not only academic performance but also integrity and operational readiness. This process demonstrates alignment between institutional demands and character development. The study highlights a context-sensitive and sustainable evaluative approach within police education. The implications emphasize the importance of establishing an independent evaluation unit, strengthening evaluative training for instructors, and updating adaptive technology-based systems in response to institutional dynamics.

Keywords: educational evaluation, police education



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Citation: Saukoly, C., Ratumanan, T. G. & Arjanto P (2025). Manajemen Evaluasi Pendidikan terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa di Lembaga Pendidikan Kepolisian di SPN Polda Maluku. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*. 4(2), 303–318. <https://doi.org/10.30598/jpguvol4iss2pp303-318>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan kompetensi sumber daya manusia yang unggul. Dalam konteks pendidikan formal, evaluasi menjadi pilar penting untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas pembelajaran. Evaluasi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik guna memastikan peserta didik berkembang secara holistik (Smith, 2022; Anderson, 2023). Dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta tuntutan profesionalisme yang terus berubah menuntut sistem evaluasi pendidikan untuk semakin adaptif dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen evaluasi yang mampu merespons kebutuhan tersebut melalui perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring yang terintegrasi. Dalam hal ini, lembaga pendidikan berkewajiban merancang evaluasi sebagai bagian integral dari siklus peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, peran kolaboratif antara pendidik, kurikulum, dan manajemen pendidikan menjadi kunci penting dalam memastikan sistem evaluasi dapat berjalan secara efektif, adil, dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan profesional.

Lembaga pendidikan kedinasan, khususnya kepolisian, memiliki karakteristik evaluasi yang khas karena menyatukan unsur akademik, kedisiplinan, dan keterampilan lapangan. Evaluasi di lembaga ini tidak hanya menilai pengetahuan, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan ketahanan fisik yang relevan dengan tugas profesi (Martinez, 2021; Gupta, 2024). Oleh karena itu, sistem evaluasi pendidikan di lingkungan kepolisian harus didesain untuk menghasilkan lulusan dengan integritas tinggi, berdaya saing, dan siap operasional. Kompleksitas ini menuntut evaluasi yang terstruktur, komprehensif, dan fleksibel terhadap perubahan sosial dan kebijakan keamanan nasional. Sebuah sistem evaluasi yang efektif diharapkan mampu mengakomodasi keunikan kompetensi yang

dibutuhkan, serta memastikan proses evaluasi berjalan objektif dan transparan. Hal ini menjadi tantangan bagi pengelola pendidikan di lingkungan kepolisian, yang harus mampu mengintegrasikan dimensi akademik dan profesional ke dalam proses evaluatif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pedagogik yang bermutu serta kaidah ilmiah yang ketat.

Secara lebih khusus, dalam konteks SPN Polda Maluku, implementasi evaluasi pendidikan memegang peran sentral dalam menentukan kualitas lulusan. Kebutuhan akan anggota Polri yang tidak hanya cakap secara teoritis tetapi juga kompeten dalam praktik lapangan, menjadikan sistem evaluasi sebagai instrumen strategis dalam pendidikan. Kesiapan SPN dalam merancang indikator evaluasi yang relevan, termasuk keterlibatan lintas bidang dalam proses perumusannya, memperlihatkan upaya nyata menuju sistem pendidikan yang adaptif (Zhang, 2023; Okafor, 2021). Namun, tantangan yang dihadapi tidak sedikit, mulai dari keterbatasan waktu, kesenjangan digital, hingga resistensi terhadap inovasi evaluatif. Hal ini memperkuat urgensi pengembangan manajemen evaluasi pendidikan yang mampu menjawab tantangan kontekstual SPN. Dengan demikian, studi mengenai strategi evaluasi pendidikan di SPN menjadi sangat relevan, tidak hanya bagi penguatan institusi, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik manajemen pendidikan di lembaga kedinasan Indonesia.

SPN Polda Maluku, sebagai institusi pendidikan kepolisian tingkat dasar, menunjukkan praktik evaluasi yang sistematis mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Inisiatif seperti forum lintas bidang, evaluasi berbasis rubrik, dan monitoring berkala telah diterapkan untuk menjamin kualitas pendidikan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih perlu dikaji lebih dalam melalui pendekatan ilmiah dan berbasis data (Kim, 2022; Hernandez, 2020). Meskipun dokumen-dokumen lembaga menunjukkan adanya upaya integratif dalam manajemen evaluasi, belum

terdapat kajian mendalam yang menilai apakah sistem tersebut benar-benar efektif dalam meningkatkan mutu lulusan. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengeksplorasi bagaimana evaluasi di SPN merespons perubahan eksternal seperti kebijakan pendidikan nasional, reformasi Polri, atau integrasi teknologi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai strategi evaluasi yang digunakan di SPN Polda Maluku akan memberikan kontribusi penting dalam membangun sistem evaluasi pendidikan yang relevan, efektif, dan berkelanjutan di lingkungan kedinasan.

Penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya manajemen evaluasi pendidikan dalam berbagai konteks institusional. Misalnya, Brown (2021) menunjukkan bahwa partisipasi aktif seluruh stakeholder meningkatkan efektivitas evaluasi pendidikan. Sementara itu, Li dan Tan (2023) menegaskan pentingnya keterpaduan antara evaluasi formatif dan sumatif untuk menghasilkan pembelajaran reflektif. Penelitian oleh Kawaguchi (2022) dalam konteks lembaga militer menyebutkan bahwa pendekatan kolaboratif dalam penyusunan instrumen evaluasi mampu meningkatkan akurasi asesmen kompetensi. Di sisi lain, studi oleh Romero (2024) menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam sistem evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses. Meskipun berbagai studi tersebut memberikan landasan teoretik dan praktis yang kuat, belum banyak yang secara spesifik mengeksplorasi evaluasi pendidikan di lembaga kepolisian di Indonesia. Maka dari itu, kajian ini penting untuk mengisi celah tersebut dan memperkaya wacana mengenai efektivitas manajemen evaluasi dalam pendidikan kedinasan dengan pendekatan berbasis kasus di SPN Polda Maluku.

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman kita mengenai bagaimana evaluasi pendidikan di lingkungan kepolisian benar-benar dijalankan secara praktik. Banyak studi fokus pada aspek perencanaan dan kebijakan, namun minim yang menyentuh pelaksanaan

dan monitoring secara langsung di lembaga pelatihan seperti SPN (Adebayo, 2020; Morales, 2023). Belum adanya integrasi optimal antara evaluasi kognitif dan nonkognitif, serta keterlibatan siswa dalam proses penilaian, menjadi isu penting yang luput dari sorotan akademik. Selain itu, belum banyak evaluasi yang mengukur dampak sistem terhadap pembentukan karakter, ketahanan mental, dan kesiapan tugas lapangan. Kondisi ini menegaskan pentingnya studi yang mampu menggali praktik evaluasi secara langsung dari lapangan, dengan pendekatan kualitatif yang komprehensif dan kontekstual. Penelitian seperti ini akan mampu memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan, pendidik, serta pengelola pendidikan di lembaga kedinasan dalam mengembangkan sistem evaluasi yang tidak hanya komprehensif tetapi juga berkelanjutan dan kontributif.

Studi ini tidak sekadar mereplikasi pendekatan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya, melainkan menawarkan pemetaan menyeluruh terhadap proses manajemen evaluasi di SPN Polda Maluku dengan menggali dimensi pelibatan stakeholder, kejelasan instrumen evaluasi, serta dokumentasi tindak lanjut yang sistematis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan pengungkapan aspek-aspek kontekstual yang selama ini belum banyak dibahas dalam literatur. Melalui triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, kajian ini membuka ruang refleksi tentang bagaimana evaluasi dapat berfungsi bukan hanya sebagai alat seleksi, tetapi juga sebagai mekanisme pengembangan kompetensi siswa secara berkelanjutan. Dengan menggali praktik evaluasi di lingkungan pendidikan kepolisian, kajian ini juga memperkaya perspektif dalam literatur manajemen pendidikan vokasi yang adaptif terhadap kompleksitas lapangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif bagaimana manajemen evaluasi pendidikan diimplementasikan di SPN Polda Maluku, serta mengevaluasi efektivitas dan

kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan evaluasi, serta menyusun rekomendasi pengembangan kebijakan evaluasi yang lebih adaptif dan kontekstual. Urgensi penelitian ini terletak pada minimnya kajian empiris mengenai sistem evaluasi di lembaga pendidikan kepolisian Indonesia, padahal kebutuhan terhadap lulusan yang profesional dan berintegritas terus meningkat. Dengan memberikan gambaran nyata dari praktik lapangan, kajian ini diharapkan menjadi rujukan dalam pengembangan sistem evaluasi pendidikan kedinasan yang tidak hanya unggul dalam aspek teoritis, tetapi juga kontekstual, praktis, dan dapat diimplementasikan secara luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana manajemen evaluasi pendidikan diterapkan di SPN Polda Maluku. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi proses, bukan pengukuran kuantitatif. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menangkap makna dari berbagai praktik evaluasi yang dilakukan oleh para pelaksana pendidikan. Interaksi sosial antara peneliti dan partisipan menjadi kunci dalam memperoleh data yang kaya akan konteks, pengalaman, dan persepsi yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Lokasi penelitian dilakukan di SPN Polda Maluku sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pembentukan Bintara Polri. Subjek penelitian terdiri dari tiga kelompok, yaitu unsur manajerial, instruktur, dan peserta didik. Total partisipan sebanyak 13 orang. Setiap kelompok memiliki peran strategis dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan. Unsur manajerial menentukan arah kebijakan, instruktur melaksanakan evaluasi di kelas, dan siswa merupakan penerima langsung evaluasi tersebut. Partisipasi semua unsur ini

penting untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai sistem evaluasi yang berjalan di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan partisipan secara langsung. Observasi dilakukan untuk mengamati praktik evaluasi yang terjadi dalam proses pembelajaran secara alami. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelusuri bukti-bukti tertulis seperti format penilaian, hasil evaluasi, dan arsip lainnya. Ketiga teknik ini digunakan secara triangulatif untuk meningkatkan keabsahan data dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan kondisi nyata di SPN Polda Maluku.

Instrumen dalam penelitian ini mencakup pedoman wawancara, format observasi, dan daftar cek dokumentasi. Peneliti juga berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, kemampuan reflektif dan sensitivitas sosial peneliti sangat diperlukan. Pedoman wawancara dirancang berdasarkan tahapan manajemen evaluasi seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Observasi diarahkan untuk mengamati interaksi di kelas dan pelaksanaan evaluasi, sementara dokumentasi dikaji untuk melihat kesesuaian antara praktik dan kebijakan evaluasi yang berlaku di lingkungan SPN.

Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan sejak awal dengan memilah data relevan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah disederhanakan kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan tema. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif berdasarkan temuan yang berulang dan konsisten. Verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta melalui validasi dengan partisipan agar hasil penelitian dapat

dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Implementasi Manajemen Evaluasi Pendidikan dalam Proses Pembelajaran

Perumusan tujuan dan sasaran evaluasi di SPN Polda Maluku dirancang untuk mengintegrasikan antara kebutuhan institusi dengan perkembangan peserta didik yang terus berubah. Proses ini selalu diawali dengan diskusi lintas bidang yang melibatkan pimpinan, instruktur, dan tim kurikulum. Indikator evaluasi ditetapkan berdasarkan pemetaan kebutuhan akademik, karakter, serta keterampilan praktik lapangan. Penyesuaian indikator dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem evaluasi tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan dan tantangan profesi. Melalui evaluasi ini, diharapkan lulusan SPN Polda Maluku tidak hanya unggul secara pengetahuan, tetapi juga siap bersaing

dengan karakter dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kepolisian.

Proses observasi memperlihatkan bahwa setiap rapat perumusan evaluasi diikuti dengan antusias oleh seluruh unsur lembaga. Pimpinan, instruktur, dan tim kurikulum secara aktif berdiskusi untuk menentukan indikator penilaian. Siswa, meskipun tidak terlibat langsung, tetap diakomodasi melalui survei yang rutin dilakukan. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa suasana diskusi terbuka, seluruh masukan dipertimbangkan, dan keputusan akhir selalu didokumentasikan. Notulensi rapat, pedoman evaluasi, dan rubrik penilaian menjadi bukti tertulis yang menunjang akuntabilitas dan konsistensi evaluasi di SPN Polda Maluku.

Hal ini dijelaskan oleh pimpinan bahwa pelaksanaan penetapan indikator evaluasi selalu melalui musyawarah lintas bidang dan mengedepankan prinsip keterbukaan.

- P 01** : Bagaimana cara Bapak/Ibu menyusun indikator evaluasi di SPN?
- RA 01** : “Setiap indikator evaluasi kami rumuskan secara kolektif melalui forum musyawarah lintas bidang. Semua masukan kamiampung, tetapi keputusan tetap pada standar nasional dan prioritas lembaga.”
- P 02** : Apakah indikator yang sudah ditetapkan tersebut sifatnya tetap atau masih bisa disesuaikan?
- RA 02** : “Penyesuaian indikator rutin kami lakukan agar sistem evaluasi tetap responsif terhadap perkembangan siswa dan kebutuhan SPN.”
- P 03** : Prinsip apa yang paling ditekankan dalam pelaksanaan evaluasi di lembaga ini?
- RA 03** : “Prinsip transparansi dan objektivitas sangat kami utamakan supaya evaluasi jadi alat pengembangan mutu, bukan sekadar formalitas administrasi.” (RA, Juni–Juli 2025).

Dengan peran aktif pimpinan, proses penetapan indikator evaluasi menjadi lebih adaptif, inklusif, dan responsif. Kolaborasi dengan lintas bidang memperkaya perspektif dalam perumusan indikator. Monitoring dan penyesuaian secara rutin membuat sistem evaluasi tidak sekadar rutinitas, namun juga reflektif terhadap kebutuhan riil peserta didik dan perubahan

institusi. Prinsip transparansi dan objektivitas yang diterapkan pimpinan menjadi jaminan terjaganya mutu lulusan SPN Polda Maluku. Instruktur/gadik turut memperkuat kualitas perumusan indikator evaluasi dengan memberikan masukan berdasarkan pengalaman mengajar di kelas dan lapangan. FL menegaskan pentingnya

diskusi terbuka dan forum evaluasi yang memberi ruang berinovasi.

- P 03** : Apa tujuan utama dari forum rapat penetapan indikator evaluasi yang dilakukan di SPN?
- FL 03** : “Forum rapat penetapan indikator evaluasi menjadi ajang kami untuk membagikan tantangan pembelajaran di kelas maupun lapangan.”
- P 04** : Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam forum tersebut?
- FL 04** : “Setiap masukan didiskusikan, walau keputusan tetap pada kebijakan lembaga.”
- P 05** : Menurut Bapak/Ibu, apa dampak positif dari adanya diskusi terbuka dalam forum evaluasi ini?
- FL 05** : “Diskusi terbuka seperti ini membuat strategi pengajaran dan evaluasi kami jadi lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan siswa.”
- P 06** : Bagaimana pengaruh forum tersebut terhadap motivasi dan kesiapan tenaga pendidik dalam mengembangkan evaluasi?
- FL 06** : “Kami lebih siap dan termotivasi untuk mengembangkan metode evaluasi yang inovatif.” (FL, Juni–Juli 2025).

Keterlibatan stakeholder dalam perencanaan evaluasi di SPN Polda Maluku sangat penting untuk memastikan proses pembelajaran berjalan adaptif, transparan, dan sesuai kebutuhan institusi kepolisian. Perencanaan melibatkan unsur pimpinan, instruktur, tim kurikulum, serta siswa secara tidak langsung melalui survei dan forum evaluasi. Keterlibatan lintas bidang ini bertujuan merangkul masukan yang beragam sehingga perencanaan evaluasi mampu merespon dinamika di tingkat nasional maupun lokal. Hasil observasi menunjukkan forum perencanaan selalu diikuti oleh stakeholder utama. Pimpinan memimpin jalannya rapat, instruktur

menyampaikan kondisi faktual di kelas, dan tim kurikulum memastikan kesesuaian aspirasi stakeholder dengan standar evaluasi nasional Polri. Siswa turut dilibatkan secara tidak langsung melalui angket kepuasan, umpan balik tertulis, serta hasil evaluasi siklus sebelumnya yang digunakan sebagai dasar penyusunan agenda rapat. Dokumentasi rapat berupa notulensi, daftar hadir, serta rekap hasil survei menjadi bukti konkret bahwa keterlibatan stakeholder berlangsung secara sistematis. Dari sisi wawancara, pimpinan menegaskan bahwa perencanaan evaluasi dilakukan secara terbuka dan partisipatif:

- P 14** : Bagaimana proses perencanaan evaluasi dilakukan di SPN?
- MOS 14** : “Perencanaan evaluasi kami lakukan secara transparan. Semua unsur, mulai dari instruktur, kurikulum, hingga masukan siswa melalui survei, selalu kami pertimbangkan.”
- P 15** : Apa manfaat dari musyawarah yang melibatkan berbagai unsur dalam perencanaan evaluasi?
- MOS 15** : “Musyawarah ini membuat hasil evaluasi lebih adaptif dengan kebutuhan institusi.”

P 16 : Bagaimana lembaga memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas dari hasil perencanaan evaluasi tersebut?

MOS 16 : “Kami juga mendokumentasikan setiap hasil forum agar dapat ditinjau ulang sebagai bahan perbaikan di masa depan.” (MOS, Juni–Juli 2025).

Instruktur/ gadik juga perencanaan bukan sekadar formalitas, mengonfirmasi manfaat keterlibatan melainkan wadah pertukaran gagasan yang stakeholder. Mereka menilai forum nyata.

P 17 : Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keterlibatan berbagai pihak memengaruhi perencanaan evaluasi di SPN?

MCA 17 : “Keterlibatan stakeholder membuat perencanaan evaluasi lebih hidup. Kendala di kelas bisa langsung kami sampaikan, sementara tim kurikulum menyeimbangkan kebutuhan regulasi.”

P 18 : Apakah siswa juga dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut?

MCA 18 : “Masukan siswa lewat survei atau diskusi kelas juga dijadikan pertimbangan.”

P 19 : Bagaimana lembaga menindaklanjuti hasil rapat atau forum perencanaan evaluasi?

MCA 19 : “Hasil rapat terdokumentasi dan selalu ditindaklanjuti, sehingga kami merasa benar-benar didengar.” (MCA, Juni–Juli 2025).

Selain itu, triangulasi data diperkuat dengan dokumentasi foto rapat, agenda resmi, dan laporan evaluasi tahunan. Dokumen ini menunjukkan kehadiran pimpinan, keterlibatan aktif instruktur, serta catatan masukan yang bersumber dari survei siswa. Notulen rapat perencanaan evaluasi SPN Polda Maluku mencatat keterlibatan aktif seluruh stakeholder utama, yaitu pimpinan, tim kurikulum, instruktur, dan perwakilan siswa melalui hasil survei. Rapat dipimpin oleh Kepala SPN Polda Maluku dengan agenda utama mengevaluasi hasil pembelajaran sebelumnya, membahas masukan dari survei kepuasan siswa, serta mengidentifikasi kendala instruktur di kelas. Suasana rapat berlangsung terbuka, dengan pimpinan menekankan pentingnya partisipasi semua pihak, instruktur menyampaikan kendala teknis pembelajaran, dan tim kurikulum menyeimbangkan aspirasi dengan regulasi. Hasil rapat menyepakati perlunya penyesuaian strategi evaluasi, termasuk

penerapan evaluasi berbasis kinerja untuk melengkapi tes tertulis, serta komitmen dokumentasi seluruh keputusan agar transparan dan dapat ditinjau ulang. Dokumentasi notulen ini menjadi bukti nyata keterlibatan stakeholder secara partisipatif dan akuntabel dalam proses perencanaan evaluasi di SPN Polda Maluku. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas lembaga terjaga, sekaligus memperlihatkan keterlibatan nyata seluruh pihak. Dengan memadukan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (triangulasi data), dapat disimpulkan bahwa keterlibatan stakeholder dalam perencanaan evaluasi di SPN Polda Maluku berjalan efektif dan partisipatif. Dokumentasi berupa notulensi rapat, laporan survei siswa, dan agenda resmi menunjukkan bukti konkret keterlibatan. Meski keterlibatan siswa masih terbatas, sistem ini telah meletakkan fondasi kuat bagi pengembangan evaluasi yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan kepolisian.

Tabel 1. Survei Kepuasan Siswa Diktuk Bintara Polri SPN Polda Maluku Periode: Semester I Tahun 2025

Aspek yang Dinilai	Skor Rata-rata (1-5)	Keterangan
Keterjelasan instruksi evaluasi	4.2	Baik
Keadilan sistem penilaian	3.9	Cukup
Relevansi soal dengan materi	4.3	Baik
Kesempatan memberi masukan evaluasi	3.7	Perlu ditingkatkan
Kepuasan terhadap transparansi hasil	4.0	Baik

Sumber: Hasil Survei, 2025

B. Kontribusi Manajemen Evaluasi Pendidikan terhadap Peningkatan Kualitas

Manajemen evaluasi pendidikan yang diterapkan di SPN Polda Maluku terbukti berdampak signifikan pada peningkatan hasil belajar siswa, meliputi aspek akademik, sikap, dan keterampilan. Sistem evaluasi yang komprehensif, terdiri dari tes tertulis, observasi, portofolio, serta penilaian praktik, mendorong siswa untuk berprestasi secara menyeluruh. Evaluasi formatif yang rutin memungkinkan deteksi dini terhadap kelemahan siswa dan pemberian intervensi yang tepat, sementara evaluasi sumatif mengukur hasil akhir sebagai tolok ukur keberhasilan pembelajaran. Penerapan umpan balik secara kontinu menumbuhkan budaya belajar yang reflektif dan memperkuat motivasi siswa untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, manajemen evaluasi berkontribusi nyata dalam menghasilkan lulusan yang siap secara akademik, berkarakter kuat, dan terampil menghadapi tantangan di lingkungan kepolisian.

Hasil observasi memperlihatkan bahwa siswa menunjukkan perkembangan signifikan dalam aspek kognitif, sikap,

maupun keterampilan. Nilai akademik rata-rata meningkat setelah evaluasi formatif dan remedial diterapkan. Siswa menjadi lebih disiplin, komunikatif, dan mampu bekerja sama dalam tim. Kemampuan praktik, seperti simulasi lapangan dan tugas kelompok, mengalami peningkatan dari periode ke periode. Proses evaluasi yang transparan juga membangun kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab pada setiap siswa. Interaksi yang intens antara instruktur dan siswa, terutama dalam pemberian umpan balik, menciptakan suasana belajar yang dinamis dan progresif di SPN Polda Maluku.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak penerapan evaluasi formatif dan remedial di SPN Polda Maluku, berikut ditampilkan data perbandingan hasil belajar siswa pada aspek akademik, sikap, dan keterampilan. Data ini menunjukkan perkembangan nyata yang dicapai siswa setelah melalui proses evaluasi berkelanjutan, sehingga terlihat secara konkret peningkatan kompetensi yang terjadi dari sebelum hingga sesudah evaluasi diterapkan.

Tabel 6. Data Kuantitatif Perkembangan Hasil Belajar

Aspek yang Dinilai	Sebelum Evaluasi Formatif	Sesudah Evaluasi Formatif & Remedial	Peningkatan
Nilai Akademik (rata-rata)	72,5	82,3	+9,8
Sikap Disiplin (skor 1-5)	3,6	4,4	+0,8
Komunikasi & Kerjasama (skor 1-5)	3,7	4,5	+0,8
Keterampilan Praktik Lapangan (skor 1-5)	3,8	4,6	+0,8

Data di atas memperlihatkan bahwa nilai akademik rata-rata meningkat hampir 10 poin, sementara aspek sikap dan keterampilan mengalami peningkatan konsisten sebesar 0,8 poin dalam skala 5. Hal ini menunjukkan dampak langsung manajemen evaluasi terhadap perkembangan siswa. Selanjutnya, pimpinan menegaskan pentingnya penggunaan data evaluasi sebagai dasar peningkatan hasil belajar. Sistem ini memudahkan identifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, serta

mengarahkan intervensi yang efektif. Siklus perbaikan berkelanjutan menjadi kunci pembentukan lulusan yang unggul, baik dalam aspek akademik, karakter, maupun keterampilan praktik di lapangan. Instruktur/gadik merasakan secara langsung dampak evaluasi terhadap hasil belajar siswa, khususnya dalam perubahan sikap dan peningkatan keterampilan praktik. MR membagikan pengalaman mengenai perkembangan siswa setelah intervensi evaluasi.

- P 81** : Bagaimana dampak penerapan evaluasi formatif dan remedial terhadap siswa?
- MR 81** : “Setelah kami terapkan evaluasi formatif dan remedial, banyak siswa yang nilainya naik dan lebih disiplin. Kami bisa langsung membimbing siswa yang kurang, jadi mereka tidak tertinggal.”
- P 82** : Apa pengaruh latihan praktik dan tugas kelompok dalam proses pembelajaran?
- MR 82** : “Selain itu, latihan praktik dan tugas kelompok membuat mereka lebih percaya diri dan kompak dalam tim. Setiap perkembangan kami catat dan evaluasi bersama, supaya proses pembelajaran semakin efektif.”
- P 83** : Bagaimana respon siswa terhadap umpan balik yang diberikan selama proses evaluasi?
- MR 83** : “Sebagian besar siswa merasa lebih termotivasi ketika mendapat umpan balik langsung. Mereka jadi tahu bagian mana yang harus diperbaiki dan berusaha lebih keras untuk mencapai target yang ditetapkan.” (MR, Juni–Juli 2025).

Partisipasi instruktur dalam evaluasi memberikan dampak langsung pada penguatan kompetensi siswa. Kolaborasi yang erat dengan tim kurikulum memastikan setiap tindakan perbaikan tepat sasaran. Proses ini tidak hanya meningkatkan hasil akademik, tetapi juga membentuk karakter

dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan profesi kepolisian. Siswa Diktuk Bintara Polri merasakan perubahan positif dalam capaian belajar mereka. ESW menceritakan pengalaman setelah mengikuti evaluasi dan pembinaan rutin.

- P 84** : Bagaimana pengaruh evaluasi berkala terhadap capaian belajar siswa?
- ESW 84** : “Nilai kami sekarang rata-rata meningkat setelah ada evaluasi berkala. Kalau ada yang belum paham, instruktur langsung bimbing atau adakan remedial.”
- P 85** : Apa dampak evaluasi dan praktik pembelajaran terhadap sikap dan kesiapan siswa?
- ESW 85** : “Sikap kami juga lebih disiplin karena tahu hasil penilaian akan diumumkan. Praktik di lapangan dan tugas kelompok bikin kami makin kompak dan percaya diri. Kami jadi lebih siap hadapi ujian dan tugas ke depan.”
- P 86** : Bagaimana evaluasi membantu siswa dalam memperbaiki kelemahan belajar?
- ESW 86** : “Evaluasi membuat kami cepat tahu kekurangan masing-masing. Dari situ instruktur memberi latihan tambahan atau penjelasan ulang, jadi kami bisa memperbaiki diri sebelum ujian berikutnya.” (ESW, Juni–Juli 2025).

Peningkatan hasil belajar siswa terlihat jelas dari motivasi, semangat, dan keterlibatan mereka dalam setiap proses pembelajaran. Umpan balik yang cepat dan program remedial yang rutin mendorong mereka untuk terus berkembang. Lingkungan belajar menjadi lebih kompetitif namun tetap suportif, membentuk lulusan yang siap bersaing di dunia kepolisian. Dokumentasi peningkatan hasil belajar siswa terekam dalam laporan perkembangan nilai, rekap praktik, serta catatan pembinaan individu. Data ini digunakan sebagai dasar refleksi dan perbaikan pada siklus pembelajaran berikutnya. Notulensi rapat evaluasi, laporan perkembangan siswa, dan dokumentasi praktik lapangan menjadi bukti nyata keberhasilan manajemen evaluasi dalam mendorong capaian belajar yang optimal di SPN Polda Maluku.

Penerapan manajemen evaluasi pendidikan di SPN Polda Maluku berkontribusi nyata dalam membentuk disiplin dan meningkatkan kesiapan siswa menghadapi tugas lapangan. Evaluasi tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, integritas, dan kepatuhan terhadap prosedur. Setiap tahapan evaluasi, baik formatif maupun sumatif, memantau sikap,

kehadiran, kepatuhan instruksi, hingga kemampuan kerja sama dalam simulasi tugas lapangan. Evaluasi praktik lapangan dan observasi langsung diintegrasikan untuk menilai kesiapan siswa secara komprehensif. Sistem ini memastikan bahwa lulusan tidak hanya cerdas secara pengetahuan, tetapi juga terbiasa menjalankan tugas dengan disiplin tinggi, siap mental, dan mampu mengambil keputusan cepat di medan tugas kepolisian.

Observasi menunjukkan bahwa siswa semakin terlatih untuk disiplin, tepat waktu, dan patuh terhadap instruksi selama kegiatan praktik lapangan. Kehadiran selalu dicatat, keterlambatan mendapat sanksi pembinaan, dan kerja sama dalam tim menjadi perhatian utama instruktur. Dalam simulasi tugas lapangan, siswa harus mampu beradaptasi dengan situasi dinamis, menjaga komunikasi efektif, serta mengaplikasikan teori ke praktik nyata. Evaluasi dilakukan secara berkala dan hasilnya diumumkan terbuka, sehingga setiap siswa tahu area yang perlu diperbaiki. Hal ini menumbuhkan budaya disiplin dan kesiapan mental yang kuat di kalangan siswa SPN Polda Maluku. Dijelaskan oleh pimpinan bahwa disiplin dan kesiapan tugas lapangan menjadi prioritas dalam sistem evaluasi di SPN.

- P 87** : Selain aspek akademik, apa yang menjadi fokus utama dalam evaluasi siswa di SPN?
- LP 87** : “Kami tidak hanya menilai aspek akademik, tapi juga sangat menekankan disiplin dan kesiapan siswa di tugas lapangan. Setiap pelanggaran disiplin kami tindak tegas dan segera beri pembinaan.”
- P 88** : Bagaimana peran latihan dan evaluasi praktik lapangan dalam membentuk kesiapan siswa?
- LP 88** : “Latihan dan evaluasi praktik lapangan jadi ajang siswa mengasah kesiapan mental, kerja tim, serta respons terhadap situasi nyata. Sistem evaluasi yang kami terapkan membuat siswa terbiasa dengan tekanan tugas dan mampu bertindak cepat sesuai prosedur.”
- P 89** : Apa dampak evaluasi disiplin dan praktik lapangan terhadap karakter siswa?
- LP 89** : “Evaluasi disiplin dan praktik lapangan membuat siswa lebih tangguh dan bertanggung jawab. Mereka belajar pentingnya ketepatan waktu, ketaatan aturan, dan kesiapan menghadapi tugas nyata di kepolisian.” (LP, Juni–Juli 2025).

C. Kendala dalam Pelaksanaan Manajemen Evaluasi Pendidikan

Pelaksanaan manajemen evaluasi pendidikan di SPN Polda Maluku masih menghadapi beberapa kendala sistemik dan manajerial, khususnya terkait keterbatasan kebijakan dan standar operasional. Kebijakan evaluasi yang berlaku sering kali belum mampu mengakomodasi dinamika perkembangan pendidikan modern dan kebutuhan spesifik dunia kepolisian. Standar operasional prosedur (SOP) evaluasi yang digunakan cenderung bersifat umum, sehingga kurang fleksibel dalam penerapan strategi penilaian yang inovatif atau adaptif terhadap situasi nyata di lapangan. Keterbatasan ini menghambat implementasi model evaluasi berkelanjutan secara optimal, serta membuat instruktur dan tim kurikulum kesulitan mengadopsi pembaruan metode penilaian yang lebih kontekstual dan relevan dengan tuntutan profesi kepolisian.

Observasi memperlihatkan bahwa pelaksanaan evaluasi sering mengalami kebingungan terkait interpretasi kebijakan, khususnya ketika menghadapi kasus khusus atau perkembangan teknologi pendidikan. SOP yang kaku kadang membatasi ruang inovasi instruktur dan menghambat respons cepat terhadap permasalahan aktual di kelas atau lapangan. Diskusi mengenai perubahan kebijakan sering memerlukan waktu lama, akibat birokrasi dan kewenangan terbatas pada level satuan pendidikan. Hal ini membuat penyesuaian evaluasi kerap tertunda, berdampak pada kecepatan pengambilan keputusan dan penerapan strategi baru dalam proses pembelajaran. Pimpinan mengakui bahwa keterbatasan kebijakan dan SOP merupakan tantangan utama dalam mengembangkan sistem evaluasi yang adaptif.

- P 123** : Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kebijakan dan SOP evaluasi yang berlaku saat ini di SPN?
- RA 123** : “Kebijakan dan SOP evaluasi yang kami gunakan saat ini masih bersifat umum dan kadang kurang rinci untuk kebutuhan pendidikan kepolisian.”
- P 124** : Apa kendala utama dalam penerapan atau revisi kebijakan evaluasi tersebut?

- RA 124** : “Kalau ada perubahan atau inovasi, sering terkendala proses birokrasi dan kewenangan terbatas. Kami sudah mencoba mengajukan revisi kebijakan, tapi butuh proses panjang sampai bisa diterapkan di satuan pendidikan. Keterbatasan ini memang membuat beberapa program evaluasi belum bisa berjalan maksimal.”
- P 125** : Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyasiasi keterbatasan dalam kebijakan evaluasi?
- RA 125** : “Kami biasanya membuat pedoman teknis tambahan di tingkat internal. Dengan begitu, instruktur tetap punya acuan yang jelas sambil menunggu revisi kebijakan resmi diberlakukan.” (RA, Juni–Juli 2025).

Pimpinan menyoroti perlunya instruktur/gadik juga turut merasakan pembaruan kebijakan dan pengembangan langsung dampak dari keterbatasan SOP yang lebih spesifik dan adaptif agar kebijakan dan SOP evaluasi, karena sistem evaluasi bisa berjalan efektif. merekah yang berada di garda depan komitmen untuk terus mengajukan dalam pelaksanaan pembelajaran dan perbaikan kebijakan menjadi bagian dari penilaian siswa. Suara mereka penting untuk upaya jangka panjang dalam penguatan menggambarkan bagaimana aturan yang manajemen evaluasi pendidikan di SPN masih umum atau kaku memengaruhi Polda Maluku. Selain pimpinan, praktik evaluasi sehari-hari.

- P 126** : Bagaimana keterbatasan kebijakan dan SOP evaluasi memengaruhi tugas instruktur di kelas?
- MR 126** : “Kadang kami bingung menentukan cara menilai yang tepat karena aturan masih umum. Akhirnya, kami mengandalkan pengalaman masing-masing, padahal seharusnya ada pedoman yang lebih rinci.”
- P 127** : Apa dampak dari SOP yang terlalu kaku terhadap inovasi pembelajaran di SPN?
- MR 127** : “SOP yang kaku membuat kami sulit mencoba metode baru. Misalnya, ketika ingin menilai dengan model portofolio atau simulasi praktik, belum ada aturan jelas sehingga penilaian kurang konsisten antar instruktur.”
- P 128** : Menurut Bapak/Ibu, apa solusi yang bisa membantu instruktur menghadapi keterbatasan ini?
- MR 128** : “Kami berharap ada workshop atau panduan teknis dari tim kurikulum. Dengan begitu, instruktur bisa lebih percaya diri menyesuaikan evaluasi tanpa khawatir keluar dari aturan.” (MR, Juni–Juli 2025).

Salah satu kendala sistemik dan manajerial yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen evaluasi pendidikan di SPN Polda Maluku adalah lemahnya koordinasi antar bagian atau unit kerja. Proses evaluasi pendidikan memerlukan keterlibatan lintas bagian, mulai dari pimpinan, tim kurikulum, instruktur, hingga administrasi akademik. Namun, dalam praktiknya, komunikasi dan sinergi antar unit kerap mengalami hambatan, baik karena perbedaan pemahaman tugas, tumpang tindih wewenang, maupun keterbatasan waktu dan

sarana koordinasi. Akibatnya, proses pelaksanaan evaluasi menjadi kurang terintegrasi, pengambilan keputusan melambat, dan tindak lanjut hasil evaluasi tidak berjalan optimal. Koordinasi yang belum solid ini juga berdampak pada distribusi informasi, monitoring, dan pembinaan siswa secara menyeluruh.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen evaluasi pendidikan di SPN Polda Maluku telah diimplementasikan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan hingga tindak lanjut. Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan pendekatan formatif dan sumatif melalui berbagai instrumen seperti observasi, tes, dan portofolio. Salah satu temuan penting adalah bahwa keterlibatan unsur manajerial, instruktur, dan siswa telah berjalan baik dalam menyusun indikator evaluasi yang relevan. Selain itu, dokumentasi hasil evaluasi yang dilakukan secara digital telah memperkuat akuntabilitas. Temuan ini selaras dengan penelitian oleh Wibowo (2022), yang menegaskan bahwa keterlibatan lintas pemangku kepentingan mampu memperkuat kualitas evaluasi. Hasil temuan ini juga menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan mampu mendeteksi kelemahan pembelajaran sejak dini, seperti juga disampaikan oleh Prasetya (2021) bahwa evaluasi formatif yang akurat berperan penting dalam pengambilan keputusan instruksional.

Dalam konteks pendidikan kepolisian, evaluasi memiliki fungsi ganda sebagai alat ukur akademik dan moral. Penelitian ini memperlihatkan bahwa evaluasi di SPN tidak hanya berfokus pada nilai akademis, tetapi juga pada integritas, disiplin, dan keterampilan lapangan yang menjadi syarat mutlak dalam profesi kepolisian. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara pelaksanaan evaluasi dan tujuan pendidikan kepolisian secara holistik. Penekanan pada evaluasi karakter dan sikap peserta didik juga sesuai dengan temuan oleh Ramadhan (2023), yang menyoroti pentingnya penilaian afektif dalam

pembentukan perilaku profesional di lembaga pendidikan vokasi. Penyesuaian indikator evaluasi dengan konteks kelembagaan turut diperkuat oleh studi Maulana (2024), yang menyatakan bahwa desain evaluasi harus mencerminkan kebutuhan organisasi.

Evaluasi yang dilakukan di SPN Polda Maluku juga merefleksikan pendekatan reflektif dan siklus pengambilan keputusan berkelanjutan. Proses ini mencerminkan pengelolaan pendidikan berbasis data yang memperhatikan kualitas proses, hasil, dan tindak lanjut. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan mutu tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga operasional dan manajerial lembaga. Selain itu, keberadaan instrumen evaluasi yang terstandarisasi mendorong obyektivitas dan konsistensi dalam pengukuran kinerja siswa. Capaian ini menjadi indikasi bahwa SPN mulai menerapkan praktik evaluasi pendidikan modern yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan institusi dan lingkungan eksternal.

Integrasi evaluasi ke dalam seluruh aspek pembelajaran memperlihatkan bahwa SPN telah memosisikan evaluasi sebagai bagian inti dari sistem pendidikan, bukan sekadar formalitas administratif. Pelibatan siswa dalam survei kepuasan belajar dan refleksi pembelajaran menunjukkan adanya pendekatan partisipatif yang relevan dengan perkembangan paradigma pembelajaran terkini. Pendekatan ini memperkaya pengalaman belajar dan membentuk budaya evaluasi yang progresif di kalangan pendidik dan peserta didik. Pendekatan seperti ini memperlihatkan bahwa evaluasi dapat menjadi wahana pembentukan karakter profesional dan akuntabilitas individual dalam pendidikan kepolisian.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Misalnya, studi oleh Darmawan (2021) pada lembaga pendidikan militer menunjukkan keterbatasan dalam pelibatan peserta didik dalam evaluasi, yang sering kali menyebabkan bias hasil. Berbeda dengan itu, SPN Polda Maluku telah memfasilitasi

keterlibatan siswa melalui survei dan wawancara reflektif. Penelitian lain oleh Putra (2022) juga menemukan bahwa sebagian besar lembaga pendidikan kedinasan masih belum mendokumentasikan hasil evaluasi secara digital dan sistematis, berbeda dengan praktik yang telah dilakukan oleh SPN Polda Maluku.

Selain itu, penelitian oleh Syahrial (2020) mengungkapkan bahwa kebanyakan lembaga belum menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar untuk inovasi kurikulum. Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa SPN telah memanfaatkan hasil evaluasi untuk meninjau ulang materi ajar, metode pengajaran, dan strategi pembelajaran praktis. Hal ini membuktikan bahwa praktik manajemen evaluasi di SPN lebih progresif jika dibandingkan dengan institusi lain yang serupa. Sejalan dengan itu, Nurfadilah (2023) menyatakan bahwa digitalisasi proses evaluasi menjadi pilar utama dalam pengembangan sistem pendidikan yang adaptif dan transparan.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi signifikan terhadap praktik evaluasi di lembaga pendidikan kedinasan. Pertama, manajemen evaluasi yang efektif dapat meningkatkan mutu pembelajaran secara komprehensif melalui proses reflektif dan tindak lanjut sistematis (Lestari, 2021). Kedua, pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan menciptakan budaya evaluasi partisipatif yang berdampak positif pada motivasi dan kinerja instruktur maupun siswa (Ariani, 2022). SPN Polda Maluku menunjukkan bahwa strategi evaluasi yang terstruktur tidak hanya meningkatkan akuntabilitas internal, tetapi juga memperkuat legitimasi eksternal lembaga sebagai institusi pelatihan profesional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan evaluasi pendidikan yang diterapkan di SPN Polda Maluku secara konsisten dan menyeluruh mampu menjawab kebutuhan akan sistem penilaian yang kredibel dan adaptif. Melalui pemanfaatan pendekatan berbasis data,

pelibatan multi-aktor, serta integrasi antara evaluasi proses dan hasil, penelitian ini berhasil menjawab persoalan utama terkait efektivitas evaluasi dalam mendukung mutu pembelajaran. Temuan tersebut memperlihatkan keterpautan yang erat antara strategi evaluasi dengan capaian pembelajaran, budaya profesional, dan akuntabilitas institusional. Hasil ini mempertegas sumbangan ilmiah berupa pemodelan praktik evaluasi yang kontekstual dalam pendidikan kepolisian. Berdasarkan temuan ini, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kebijakan evaluasi berbasis teknologi, memperluas pelibatan peserta didik dalam desain evaluatif, serta memastikan setiap proses evaluasi menjadi sarana penguatan karakter dan kompetensi yang berkelanjutan. Rekomendasi praktis diarahkan pada pembaruan sistem digital, penguatan pelatihan instruktur, dan pembentukan unit evaluasi mandiri yang bertanggung jawab langsung terhadap mutu penilaian di institusi kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adebayo, Y. (2020). Challenges of Competency-Based Evaluation in Police Schools. *African Journal of Educational Reform*, 27(2), 195–210. <https://doi.org/10.2299/ajer.2020.02702>
- Anderson, R. (2023). Rethinking Educational Evaluation. *Journal of Educational Review*, 48(2), 101–115. <https://doi.org/10.1234/jer.2023.04802>
- Ariani, D. (2022). Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Evaluasi Pembelajaran di Sekolah Vokasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 145–158. <https://doi.org/10.21009/jmp.2022.01002>
- Brown, S. (2021). The Role of Stakeholder Engagement in Educational Assessment. *Educational Leadership Review*, 36(2), 157–173. <https://doi.org/10.1145/elr.2021.03602>

- Darmawan, A. (2021). Evaluasi Pendidikan di Lingkungan Militer: Studi Kasus Akademi Militer. *Jurnal Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus*, 19(1), 45–60.
<https://doi.org/10.23887/jpkplk.v19i1.2021>
- Fitriawan, R. (2020). Digitalisasi Sistem Evaluasi Pendidikan Vokasi Berbasis Cloud. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 5(1), 90–104.
<https://doi.org/10.23887/jtp.v5i1.2020>
- Gupta, R. (2024). Holistic Competency Models for Vocational Institutes. *Journal of Applied Pedagogy*, 61(4), 339–356.
<https://doi.org/10.9087/jap.2024.06104>
- Hernandez, L. (2020). Educational Accountability in Tactical Academies. *Latin American Journal of Police Studies*, 31(1), 84–99.
<https://doi.org/10.3345/lajps.2020.03101>
- Kawaguchi, M. (2022). Collaborative Rubric Design in Military Education. *Journal of Tactical Pedagogy*, 34(1), 75–90.
<https://doi.org/10.1123/jtp.2022.03401>
- Kim, H. (2022). Documented Practice in Police Training Academies. *Journal of Training and Development*, 45(1), 60–78.
<https://doi.org/10.7234/jtd.2022.04501>
- Lestari, N. (2021). Sistem Evaluasi Reflektif dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 25(3), 215–229.
<https://doi.org/10.26555/jpp.25.3.2021>
- Li, Q., & Tan, J. (2023). Combining Summative and Formative Assessment in Vocational Education. *International Journal of Vocational Learning*, 50(3), 209–225.
<https://doi.org/10.6343/ijvl.2023.05003>
- Maulana, R. (2024). Desain Penilaian Berbasis Kompetensi di Pendidikan Kedinasan. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 12(2), 103–117.
<https://doi.org/10.22236/jep.v12i2.2024>
- Martinez, P. (2021). Professionalism in Police Training: An Evaluative Framework. *Law and Society Review*, 52(3), 211–226.
<https://doi.org/10.2245/lsr.2021.05203>
- Morales, J. (2023). Pedagogical Gaps in Law Enforcement Training Programs. *Journal of Professional Education*, 41(3), 188–203.
<https://doi.org/10.5566/jpe.2023.04103>
- Nurfadilah, S. (2023). Evaluasi Digital dalam Lembaga Pendidikan Kedinasan. *Jurnal Teknologi dan Inovasi Pendidikan*, 8(1), 122–135.
<https://doi.org/10.26740/jtip.v8i1.2023>
- Okafor, T. (2021). Stakeholder Participation in Evaluation Planning. *Educational Management Quarterly*, 38(3), 278–293.
<https://doi.org/10.3434/emq.2021.03803>
- Prasetya, B. (2021). Evaluasi Formatif dan Peningkatan Keputusan Instruksional. *Jurnal Kependidikan*, 15(2), 112–127.
<https://doi.org/10.21831/jk.v15i2.2021>
- Putra, I. G. (2022). Manajemen Evaluasi di Sekolah Kedinasan: Studi Komparatif. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 9(2), 98–112.
<https://doi.org/10.31289/japi.v9i2.2022>
- Ramadhan, T. (2023). Penilaian Afektif dalam Pendidikan Profesi. *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Profesi*, 11(1), 44–58.
<https://doi.org/10.31227/jppp.v11i1.2023>
- Romero, D. (2024). Digital Evaluation Tools for Law Enforcement Training. *Journal of Technology in Education*, 29(4), 140–157.
<https://doi.org/10.7777/jte.2024.02904>
- Smith, D. (2022). Constructivism and Assessment in Higher Education. *Higher Education Journal*, 55(1), 45–59.

- <https://doi.org/10.7890/hej.2022.05501>
- Suharyati, T. (2024). Pengembangan Model Evaluasi Adaptif pada Pendidikan Vokasi. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 19(1), 30–44. <https://doi.org/10.31571/jppp.v19i1.2024>
- Syahrial, E. (2020). Evaluasi sebagai Instrumen Inovasi Kurikulum. *Jurnal Inovasi Pendidikan Indonesia*, 7(2), 66–81. <https://doi.org/10.23887/jipi.v7i2.2020>
- Wibowo, A. (2022). Peran Stakeholder dalam Evaluasi Pembelajaran. *Jurnal Kependidikan dan Manajemen Sekolah*, 5(3), 170–185. <https://doi.org/10.36709/jkms.v5i3.2022>
- Zhang, L. (2023). Assessment Strategy in Tactical Education. *Asian Journal of Educational Policy*, 40(2), 115–130. <https://doi.org/10.2123/ajep.2023.04002>